



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IMRAN PAMBUDI
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 231892

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.423.705.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 147 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 1.655.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 218 m2/144 m2 di KAB / KOTA KOTA
SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 1.210.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/40 m2 di KAB / KOTA
BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 558.705.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 315.000.000

1. MOTOR, HONDA PCX SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL
SENDIRI Rp. 15.000.000
2. MOBIL, MAZDA CX 3 Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.
300.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 377.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 566.184.844

F. HARTA LAINNYA Rp. 1.172.587.213

Sub Total Rp. 5.854.477.057

III. HUTANG Rp. 500.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 5.354.477.057

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.